

# ANALISIS TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM DI INDONESIA

**Zainuddin**

*Universitas Negeri Medan (UNIMED)*

*Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20221*

**e-mail: zain\_djaros@yahoo.com**

## **Abstrak**

Penelitian ini mendalami tentang analisis terhadap pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Miles dan Huberman. Temuan dalam penelitian ini adalah: Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Ada nuansa integrasi antara mata kuliah Pendidikan Agama dengan mata kuliah lainnya. Dinamika ini telah melalui pergolakan berbagai kepentingan, baik kepentingan secara politik, sosial, budaya, ekonomi dan emosi (sentiment) keagamaan turut ikut serta di dalamnya. Jika proses pengajaran dan pendidikan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum terintegrasi secara kontekstual maka akan menghadirkan cendekiawan muda yang bukan hanya memiliki value, tetapi juga bermental spiritual yang dapat diandalkan untuk pembangunan masyarakat bahkan pembangunan peradaban manusia di masa yang akan datang.

**Kata Kunci: Kurikulum, Karakter dan Value.**

## ***Abstract***

*This research explores the analysis of Islamic religious education at public universities in Indonesia. This research was conducted using the Miles and Huberman qualitative method. The findings in this research are: Islamic religious education in public universities has experienced a significant shift. There is a nuance of integration between Religious Education courses and other courses. This dynamic has gone*

*through the upheaval of various interests, including political, social, cultural, economic and religious emotions (sentiments). If the teaching and education process of Islamic Religious Education in Public Universities is contextually integrated, it will produce young scholars who not only have values, but also have a spiritual mentality that can be relied on for the development of society and even the development of human civilization in the future.*

### خلاصة

يستكشف هذا البحث تحليل التعليم الديني الإسلامي في الجامعات الحكومية في إندونيسيا. تم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة مايلز وهو برمان النوعية. ومن النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يلي: لقد شهد التعليم الديني الإسلامي في الجامعات الحكومية تحولاً كبيراً. هناك فارق بسيط في التكامل بين دورات التربية الدينية والدورات الأخرى. لقد مرت هذه الديناميكية باضطراب المصالح المختلفة، بما في ذلك المشاعر (المشاعر) السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية. إذا تم دمج عملية التدريس والتعليم للتربية الإسلامية في الجامعات العامة مع سياقها، فإنها ستنتج علماء شباباً ليس لديهم قيم فحسب، بل لديهم أيضاً عقلية روحية يمكن الاعتماد عليها لتنمية المجتمع وحتى تنمية الإنسان. الحضارة في المستقبل.

### Pendahuluan

Ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya, sehingga merupakan suatu hal yang bijak jika pemerintah menjadikan pendidikan agama Islam menjadi salah satu komponen yang dipelajari secara berkesinambungan dalam dunia pendidikan formal di Indonesia. Bahkan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan mata kuliah wajib pada perguruan tinggi, sekalipun pada perguruan tinggi umum.

Pada dasarnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan agama yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Perguruan tinggi umum telah terukir dalam sejarah pendidikan di tanah air sejak awal hadirnya perguruan tinggi di negeri ini. Bermula dari mata kuliah yang dianggap kehadirannya tidak diperlukan hingga dijadikan sebagai mata kuliah wajib.

Makalah ini akan membahas tentang Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Bagaimana kedudukan, problem dan prospek Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, itu lah yang menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini.

## **Kedudukan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum**

Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia telah mencatat bahwa pada tahun 1910, pendapat umum masih menyatakan bahwa Indonesia belum layak memiliki perguruan tinggi. Namun ada pula suara-suara yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti Indonesia harus mempunyai perguruan tinggi untuk melatih para ahli dan pekerja pada kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya ada pula pendapat bahwa pendidikan tinggi bagi orang Indonesia akan merusak pribadinya karena tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan akan mengalami konflik untuk mengasimilasikan diri dengan masyarakat Belanda.<sup>1</sup>

Ada pula keragu-raguan apakah orang Indonesia dapat dididik dalam ilmu pengetahuan yang setaraf dengan orang Barat, sekalipun orang Indonesia telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mencapai gelar akademik. Secara historis sosial politik, pada saat itu Indonesia adalah negara jajahan Belanda. Salah satu ciri Belanda dalam menjajah ialah melakukan pembodohan terhadap negara jajahannya. Jadi tidaklah mengherankan jika situasi seperti ini yang muncul pada saat itu.<sup>2</sup> Cara Belanda menjajah sangat berbeda dengan cara Inggris. Kalau Inggris justru mencerdaskan negara jajahannya. Apabila negara jajahannya mulai 'cerdas' mereka memberi kemerdekaan. Seiring itu pula waktu terus berjalan dan dukungan terhadap perguruan tinggi di Indonesia bertambah kuat.

Pada tahun 1919 dimulai pembangunan gedung perguruan tinggi teknik di Bandung yang secara resmi dibuka pada tahun 1920. Dengan ini lengkaplah sistem pendidikan di Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UGM, *Pendidikan Agama Islam* (Jogjakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2006), h. 23-25.

<sup>2</sup> *Ibid.*

memungkinkan seorang anak bangsa menempuh pendidikan dari sekolah rendah sampai pendidikan tertinggi melalui suatu rangkaian sekolah yang saling berkaitan. Bagi anak-anak Indonesia jalan ini masih sempit, akan tetapi jalan itu telah ada.<sup>3</sup>

Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini antara lain jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Karena Allah SWT sendiri telah mengingatkan kita bahwa Dia tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali oleh kaum itu sendiri. Sebagaimana firmannya:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...<sup>4</sup>

Kemudian dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, pada tanggal 2 April 1950 tepatnya di Yogyakarta muncullah UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. Jika kita tinjau dari segi politik pada saat itu bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan ibukota negara berada di Yogyakarta. Kedudukan pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum dalam UU No. 4 tahun 1950 belum dibicarakan secara spesifik. Baik itu dalam tujuan umum pendidikan maupun dalam tujuan pendidikan tinggi. Berikut kutipan bunyi pasal 3, pasal 7 ayat 4 dan pasal 20 yang menunjukkan hal tersebut:

#### 1. Pasal 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

#### 2. Pasal 7

Ayat 4, Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

<sup>3</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 34.

<sup>4</sup> Alquran al-Karim, *Surah al-Ra'd Ayat: 11* (Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1418 H).

### 3. Pasal 20.

Ayat 1, Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

Ayat 2, Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.<sup>5</sup>

Dari rumusan pasal-pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa tidak tercermin adanya perhatian terhadap usaha pembinaan mental spiritual dan keagamaan secara terus menerus melalui proses pendidikan. Dengan kata lain kedudukan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang ini masih sangat lemah. Kondisi ini bisa dipahami jika kita meninjau perjalanan hadirnya Undang-Undang ini, bahwa Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tidak lahir dengan begitu saja, tapi melalui proses panjang seperti halnya pembentukan UU Sisdiknas tahun 2003 yang sulit untuk disahkan karena banyak kepentingan, baik secara politik, sosial, budaya, ekonomi dan emosi keagamaan turut ikut serta di dalamnya.

Selanjutnya Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi baru dimulai sejak tahun 1960 dengan adanya ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 yang berarti pendidikan agama sebelum itu secara formalnya baru diberikan di Sekolah Rakyat sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat atas saja. Adapun dasar operasionalnya, pelaksanaan pendidikan Agama di Perguruan Tinggi tersebut ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Bab III Pasal 9 ayat 2 sub b, terdapat ketentuan sebagai berikut: "Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatan".<sup>6</sup>

Jika merujuk pada sejarah, dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1965 salah satu organisasi politik yang berpengaruh di

---

<sup>5</sup> Salinan UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran.

<sup>6</sup> Salinan UU No. 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi

parlemen adalah Partai Komunis Indonesia. Maka tidak heran jika dalam mengambil kebijakan tentang pendidikan di parlemen, mereka tentu berusaha memasukkan misi-misinya. Agar segala sesuatunya tetap terlihat ‘bijak’, unsur pendidikan agama tetap dimasukkan dalam mata kuliah, namun diberi kebebasan jika tidak berkenan untuk mengikutinya.<sup>7</sup>

Kemudian setelah meletusnya G. 30 S. PKI. pada tahun 1965, diadakan sidang umum MPRS pada tahun 1966, maka mulai saat itu status pendidikan agama di sekolah-sekolah berubah dan bertambah kuat. Dengan adanya ketetapan MPRS XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal 1 berbunyi: “Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan Universitas-Universitas Negeri.”<sup>8</sup>

Berikutnya pada tanggal 27 Maret 1989 hadirilah UU No. 2 tahun 1989. Kedudukan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang ini secara umum tertuang dalam tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam Bab II pasal 4 yang berbunyi: “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”<sup>9</sup> Kemudian dari segi kurikulum, telah dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2, yaitu: Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

- a. Pendidikan Pancasila
- b. Pendidikan agama dan
- c. Pendidikan kewarganegaraan.

---

<sup>7</sup> Daradjat. Zakiah, dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam. Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 230.

<sup>8</sup> Tap MPRS XXVII/MPRS/1966

<sup>9</sup> Salinan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas

Mata kuliah Pendidikan Agama pada perguruan tinggi dalam proses belajarnya menggunakan sistem kredit semester yang masing-masing perguruan tinggi menggunakan jumlah dan besar SKS yang bervariasi. Rata-rata pendidikan agama Islam di perguruan tinggi hanya mendapat 2 SKS dalam satu semester awal yang dimasukkan dalam komponen mata kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum).<sup>10</sup>

Kemudian muncul SK Mendiknas No. 232/U/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pada Bab I. Ketentuan Umum, yaitu pada pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Selanjutnya Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum, menurut Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi menjelaskan Visi dan Misi Mata kuliah Pengembangan Kepribadian serta Kompetensi MPK sebagai berikut: Pasal 1. Visi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Pasal 2. Misi Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggungjawab. Pasal 3. Kompetensi Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

---

<sup>10</sup> M. Arifin, *Kapita Selecta Pendidikan* (Semarang: Toha Putra, 1981), h. 76.

### **Problem Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum**

Dinamika pendidikan agama Islam dalam arti secara luas di perguruan tinggi umum tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah adanya sarana ibadah (Masjid/Musallah), tenaga kependidikan Islam, lembaga-lembaga kerohanian Islam, tersedianya sumber pendanaan, situasi dan lingkungan yang kondusif, pernik-pernik simbol Islam, dukungan pimpinan, baik moril maupun materil. Sementara faktor penghambatnya adalah manakala komponen-komponen tersebut tidak ada di kampus.

Adapun faktor eksternal yang dipandang sebagai penghambat kehidupan keagamaan, khususnya di kampus adalah situasi politik negara pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Memang sejak awal kelahirannya sikap pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam mengikuti pola kebijakan yang diterapkan Belanda, yaitu sikap toleran dan bersahabat terhadap Islam sebagai kelompok sosial-keagamaan, akan tetapi tanda-tanda sebagai kekuatan politik yang menentang kehendak penguasa.<sup>11</sup> Pada masa-masa itu selain terjadi marjinalisasi Islam politik, rezim pemerintahan Orde Baru juga melakukan usaha-usaha untuk menetralsir pengaruh Islam dalam ranah politik.

Para pemimpin awal Orde Baru bukan hanya berkepentingan untuk mengekang pengaruh kultural Islam, melainkan juga berusaha untuk memperbesar otonomi varian keagamaan “*abangan*” sebagai sebuah penyeimbang politik. Rezim Orde Baru juga menolak untuk menggunakan bahkan simbol Islam di lingkungan negara (*the official sphere*). Rezim Orde Baru mulai mengagung-agungkan politik dan budaya Jawa neo-klasik dan mengembangkan bahasa yang sangat didominasi Sansekerta. Kerajaan Hindu Majapahit yang besar dijadikan sebagai pusat teladan. Istana presiden diberi nama Bina Graha, butir-butir Pancasila disebut Eka Prasetya Pancakarsa,

---

<sup>11</sup> Endy Fadlullah, *Peta Gerakan Islam Radikal* (Surabaya: Jawa Pos 13 Juli 2008), h. 9.



dan seterusnya. Pada tahun 1973, para pemimpin Orde Baru yang berorientasi “*abangan*” melangkah lebih jauh dengan mengakui kebatinan sebagai agama tersendiri. Upaya yang dilegalisasikan lewat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut akhirnya mendapat tantangan kuat dari kaum Muslim.<sup>12</sup>

Selain itu, depolitisasi dunia akademis juga berlangsung secara nyata sejak akhir tahun 1970-an. Setelah terjadinya serangkaian demonstrasi mahasiswa selama tahun 1974-1978, yang memprotes semakin dalamnya penetrasi para investor asing, para pemodal keturunan Cina, para pejabat pemerintah, dan keluarga Soeharto dalam aktivitas bisnis, akhirnya Kopkamtib menanggapi dengan membubarkan semua Dewan Mahasiswa pada Januari 1978. Setelah itu politik di kampus dianggap sebagai

“abnormal”. Untuk “menormalisasi” kehidupan kampus, tangan kanan Ali Murtopo di *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Daud Jusuf diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru (1978-1983). Di bawah kebijakannya yang represif, forum akademis dan organisasi-organisasi mahasiswa didepolitisasi lewat sebuah kebijakan yang dikenal sebagai “Normalisasi Kehidupan Kampus” (NKK). Konsekuensinya, forum akademis, organisasi mahasiswa, dan kelompokkelompok keagamaan mahasiswa dari generasi ini dikontrol sangat ketat oleh aparat keamanan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ditemukan juga beberapa problem lain yang masih menjadi batu sandungan. Bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan tersebut seefektif mungkin. Beberapa problem tersebut antara lain:

1. Beban SKS yang minimalis (hanya 2 SKS)

Frekuensi perkuliahan agama yang hanya 2 SKS dirasa kurang memadai mengingat harapan yang demikian besar kepada pendidikan agama. Oleh karena itu bobotnya dipandang perlu

---

<sup>12</sup> Yudi Latief, *Intelegensia Muslim dan Kuasa : Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung : Mizan, 2005), h. 487-488.

<sup>13</sup> *Ibid.*

untuk ditingkatkan menjadi 4 SKS. Kecuali tenaga pendidik di perguruan tinggi umum mampu mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam mata kuliah lain. Begitu juga dosen untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, namun skill ini masih sulit didapat.

## 2. Pola pembelajaran yang berkelanjutan

Perlunya menjabarkan pendidikan agama di perguruan tinggi, sebagai kelanjutan dari materi pendidikan agama dari TK sampai dengan SLTA. Apabila pada tingkat TK materi pendidikan agama tekanannya kepada akhlak, tingkat SD kepada ibadah, tingkat SLTP kepada muamalat, tingkat SLTA kepada munakahat, maka pada perguruan tinggi materi pendidikan agama diarahkan kepada pengenalan terhadap perkembangan pemikiran dalam Islam. Penyusunan program seperti ini secara berkelanjutan dapat pula disusun pada mata kuliah agama lain.

Namun pola ini lah yang belum muncul, bahkan terkadang kita jumpai ada tenaga pendidik yang menganggap pembelajaran pendidikan agama islam itu itu-itu saja dari SD sampai perguruan tinggi. Paradigma tenaga pendidik yang seperti ini menunjukkan betapa Pendidikan Agama Islam cenderung dinilai dari segi simbolis-kuantitatif, dan bukan substansial-kualitatif. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga pendidiknya pun belum mampu menumbuhkan kesinambungan pendidikan itu.

## 3. Pola pengembangan pendidikan agama Islam

Fenomena pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah atau Perguruan Tinggi Umum tampaknya sangat bervariasi. Dalam arti ada yang cukup puas dengan pola horizontal lateral (independent), yakni bidang studi (non-agama) kadang-kadang berdiri sendiri tanpa dikonsultasikan dan berinteraksi dengan nilai-nilai agama, dan ada yang mengembangkan pola relasi lateral-sekuensial, yakni bidang studi (non agama) dikonsultasikan dengan nilai-nilai agama. Ada pula yang

mengembangkan pola vertical linier, mendudukkan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi dari berbagai bidang studi. Namun demikian, pada umumnya dikembangkan ke pola horizontal-lateral (independent), kecuali bagi lembaga pendidikan tertentu yang memiliki komitmen, kemampuan, atau political will dalam mewujudkan relasi/hubungan lateral-sekuensial dan vertical linier.

Dari kutipan di atas dapat dinyatakan bahwa masih banyak perguruan tinggi umum yang menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Tidak terintegrasi dengan mata kuliah yang lain.

#### 4. Tenaga pendidik/Dosen agama Islam

Faktor inilah yang memegang central core (intinya) pelaksanaan pelajaran agama Islam di Perguruan Tinggi. Bagaimanapun dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi harus sarjana dari suatu Perguruan Tinggi. Selain dari itu, kesediaan dari para pengasuh pendidik agama di perguruan tinggi untuk mengembangkan kemampuan penalaran akademisnya. Misalnya, untuk mengikuti program S-2 dan S-3 merupakan hal yang sangat dianjurkan. Karena dengan demikianlah diharapkan munculnya kemampuan untuk mengembangkan memahami ajaran-ajaran agama secara komprehensif, dan atas dasar itu tumbuhlah rasa kebanggaan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Karena mengikuti kuliah agama diharapkan tidak hanya bagi mahasiswa sekedar mengejar target 2 (dua) SKS, tetapi yang lebih penting lagi semakin meyakini akan kebenaran ajaran agama yang dianutnya.

Namun kebijakan ini terkadang ditanggapi sebagai suatu pemaksaan. Sehingga tidak jarang, banyak dosen yang melanjutkan jenjang pendidikannya, tetapi tidak mengikuti proses pembelajaran yang semestinya. Dosen-dosen seperti ini cenderung beranggapan ijazah lebih penting daripada proses tersebut. Inilah yang menyebabkan banyak sarjana-sarjana 'mandul' di Indonesia. Sarjana-sarjana yang motivasi belajarnya telah mati, namun

masih tergiur dengan iming-iming tahta. Mereka tak ubahnya sebagai penyembah berhala di era digital ini. Maka jika kita sekarang meributkan tentang pendidikan karakter, muncullah suatu pertanyaan; dari manakah pendidikan karakter itu harus dimulai? Fenomena ini tak ubahnya bagaikan lingkaran setan.

#### 5. Perilaku mahasiswa yang menyimpang dari nilai-nilai akademik

Melalui media cetak atau pun media elektronik kita selalu mendapati berita yang menunjukkan berbagai perilaku mahasiswa yang jauh dari nilai-nilai akademik. Misalnya saja banyak mahasiswa yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa amoral, sex bebas, aksi tawuran, perkelahian, tindak kriminalitas, geng motor dan lain-lain.

Fenomena di atas menunjukkan betapa pendidikan agama di perguruan tinggi nyaris ‘tidak tepat sasaran’. Problem pendidikan agama ini tidak lain cerminan problem hidup keberagamaan di Tanah Air yang telah terjebak ke dalam formalisme agama. Pemerintah merasa puas sudah mensyaratkan pendidikan agama sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum. Guru agama merasa puas sudah mengajarkan materi pelajaran sesuai kurikulum. Peserta didik merasa sudah beragama dengan menghafal materi pelajaran agama. Semua pihak merasa puas dengan obyektifikasi agama dalam bentuk kurikulum dan nilai rapor atau nilai mata kuliah, namun jauh dari implementasinya. Perlu juga kita cermati, semata-mata menyalahkan pendidikan agama untuk kasus seperti ini adalah tidak bijak. Tetapi itulah image yang terkadang hadir di masyarakat.

#### 6. Lingkungan kampus

Lingkungan perguruan tinggi berada harus juga dijadikan perhatian pendidik yang bersangkutan dalam arti lingkungan sosio-kultural; yang menjadi persoalan dalam hubungan ini ialah: apakah dosen dan mahasiswa harus menyesuaikan diri? Juga masih dalam masalah lingkungan yaitu yang langsung berpengaruh pada mahasiswa dalam kampus, atau bahkan dalam kelas perlu diciptakan *religious environment* seperti adanya Musholla dalam

kampus, peringatan-peringatan hari besar Islam, tatasusila dalam pergaulan, berpakaian, bertingkah laku sopan, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal ini Azyumardi Azra juga mengemukakan bahwa pendidikan memberikan kepada anak didik dorongan dan rasa berprestasi melalui penguasaan pelajaran dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup> Prestasi akademis yang mereka capai, pada gilirannya, juga mendorong munculnya rasa elitisme, yang kemudian memunculkan sikap dan gaya hidup tersendiri, termasuk dalam kehidupan politik. Semakin terpisah lingkungan sekolah dari lingkungan masyarakat pada umumnya, maka semakin tinggi pula sikap elitisme tersebut. Elitisme yang bersumber dari sekolah ini kemudian memunculkan elitisme “terpisah” dari masyarakat; tetapi pada saat yang bersamaan, mereka memegang pendapat bahwa dengan keunggulan dan priveleges yang mereka miliki, mereka mempunyai “hak” alamiah untuk memerintah masyarakat. Mengacu pada beberapa kutipan di atas, lingkungan kampus juga mendukung keberhasilan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum.

Beberapa problem yang dipaparkan di atas hanyalah segelintir dari berbagai problem kompleks yang hadir di sekitar kita. Kekhawatiran akan fenomena problem tersebut yang nantinya berujung pada kegagalan pendidikan agama di perguruan tinggi. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan problem yang serius bagi jalannya pembangunan di masa depan karena dikhawatirkan munculnya ilmuan yang disatu sisi memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam disiplin ilmu yang ditekuninya tetapi mengalami kekosongan batin yaitu landasan etik, moral dan dari ketinggian profesionalisme itu membawa dampak negatif yaitu tidak diimbangnya penemuan itu dengan kokohnya prinsip-prinsip moral. Padahal tujuan pendidikan itu sesungguhnya adalah memanusiakan manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

<sup>15</sup> M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat* (Medan: Media Persada, 2000), h. 73.

Kemudian jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu: *“Islamic education is an education which trains the sensibility of pupils in such a manner that in their attitude to life, their actions, decisions and approach to all kinds of knowledge, they are governed by the spiritual and deeply felt ethical values of Islam. They are trained, and mentally disciplined, so that they want to acquire knowledge not merely to satisfy an intellectual curiosity or just for material worldly benefit, but to develop as rational, righteous beings and bring about the spiritual, moral and physical welfare of their families, their people, their country and mankind”*.<sup>16</sup>

Terjemahan bebasnya adalah: Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih kepekaan murid sedemikian rupa dalam menyikapi kehidupan, tindakan mereka, keputusan dan pendekatan untuk semua jenis pengetahuan, mereka dibangun secara spiritual dan sangat merasakan nilai-nilai etika Islam. Mereka dilatih, secara mental disiplin, sehingga mereka ingin memperoleh pengetahuan bukan hanya untuk memuaskan keingintahuan intelektual atau hanya untuk keuntungan materi duniawi, melainkan untuk berkembang secara rasional, makhluk sebenarnya dan bermental spiritual, moral dan sumber kesejahteraan bagi keluarga mereka, masyarakat disekitar mereka, negara mereka dan umat manusia.

Berdasarkan kutipan tujuan pendidikan Islam di atas, maka dapat dinyatakan betapa pentingnya solusi guna menyelesaikan beberapa problem tersebut. Karena problem-problem tersebut jika dibiarkan bisa bertransformasi menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

### **Prospek Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum**

Beranjak dari beberapa problem yang telah dipaparkan di atas maka kenyataan tersebut telah mendorong pihak-pihak yang peduli akan pendidikan untuk melakukan terobosan baru yang dapat

---

<sup>16</sup> Ajjjola. Alhaji A.D, *Restructure of Islamic Education* (Delhi: Adam publisher & Distributors, 1999), h. 109.

mencerahkan prospek pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Beberapa terobosan tersebut antara lain:

### 1. Paradigma Baru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama

Pada Perguruan Tinggi Umum terdapat perbedaan pengembangan pendidikan Agama Islam. Perbedaan model ini muncul karena adanya perbedaan pemikiran dalam memahami aspek-aspek kehidupan. Apakah agama merupakan bagian dari aspek kehidupan, sehingga hidup beragama berarti menjalankan salah satu aspek dari berbagai aspek kehidupan, atautkah agama merupakan sumber nilai-nilai dan operasional kehidupan, sehingga agama akan mewarnai segala aspek kehidupan itu sendiri?<sup>17</sup> Maka dalam konteks ini muncullah model dikotomis, model mekanisme dan model organism/sistemik.

Model dikotomis memandang segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, pendidikan agama dan pendidikan non agama, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja. Sedangkan model mekanisme memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak.

Model organism/sistemik dalam konteks pendidikan Islam bertolak dari pandangan bahwa aktifitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup

---

<sup>17</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 76.

bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Pandangan semacam itu menggaris bawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental value yang tertuang dan terkandung dalam Alquran dan Sunnah sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahi didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insan yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai keagamaan.

Dari ketiga model tersebut maka model organism/sistemik yang paling ideal jika disandingkan dengan Visi dan Misi PAI di perguruan tinggi umum. Hal ini sudah tergambar dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006. Jika hal ini dapat terealisasi, maka pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum akan cerah prospeknya di masa yang akan datang.

## 2. Integrasi Inklusivitas Islam dalam Pendidikan Agama Islam.

Dadan Muttaqien dalam Prospek Pendidikan Agama Islam di Tengah Perubahan Zaman menawarkan paradigma yang hampir senada dengan yang telah diuraikan di bagian 'a'. Paradigma tersebut dalam bentuk Integrasi Inklusivitas Islam dalam Pendidikan Agama Islam. Pemaparannya dalam hal ini yaitu: Jika masih ingin eksis dan survive, semangat inklusivitas ajaran Islam harus benar-benar integral dalam materi ajar dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Namun yang perlu menjadi catatan jangan sampai terjebak oleh inklusivitas menurut retorika Barat dalam hal-hal teori tentang pluralisme, HAM dan lain-lainnya, karena semua itu harus dikembalikan kepada sumbernya yang asli yaitu Alquran dan as-Sunnah meskipun tetap dengan semangat yang mengkritisi setiap interpretasi terhadap kedua sumber tersebut. Sikap Islam terhadap pluralitas misalnya, merupakan sikap pertengahan di antara dua kutub ekstrim pandangan manusia terhadap pluralitas



yang menolak pluralitas mentah-mentah dan yang menerima pluralitas mentah-mentah.

Pandangan manusia yang menolak pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang menganggap pluralitas sebagai sebuah bencana yang membawa pada perpecahan sehingga pluralitas harus dihilangkan dan keseragaman mutlak harus dimunculkan.<sup>18</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada “totaliterisme Barat” yang diwakili oleh Uni Soviet saat itu. Pandangan manusia yang menerima pluralitas mentah-mentah adalah pandangan yang menganggap pluralitas sebagai sebuah bentuk kebebasan individu yang tidak ada keseragaman sedikit pun. Hal ini terlihat pada model “liberalisme Barat” di banyak negara. Sikap Islam yang moderat, yang menerima pluralitas sekaligus menerima keseragaman, dapat dilihat dari penerimaan Islam terhadap beragam mazhab fikih, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan atau keseragaman syariat Islam.

Pernyataan di atas juga relevan dalam upaya memproteksi mahasiswa yang cenderung ‘darah muda’ yang gampang berapi-api dan labil. Terutama dalam menerima paham-paham dengan atas nama agama, seperti paham-paham Negara Islam Indonesia (NII) yang marak akhir-akhir ini. Disamping itu konsep integrasi inklusivitas ini sangat tepat jika diterapkan pada Perguruan Tinggi Umum yang masih menyajikan Pendidikan Agama Islam hanya 2 SKS. Karena ada juga beberapa perguruan tinggi umum yang menyajikan mata kuliah Pendidikan Agama lebih dari 2 SKS.

## **Kesimpulan**

Dalam studi agama Islam tidak ada pemisahan antara pengajaran dengan pendidikan. Jika dapat dibedakan hanya sebatas maknanya saja. Pengajaran merupakan strategi untuk mengaktualkan pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan suatu nilai (value)

---

<sup>18</sup> Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 179-180.

yang terus berjalan agar dapat diwujudkan. Namun dalam prosesnya pengajaran dan pendidikan merupakan sebuah proses yang integral. Perjalanan panjang kebijakan yang menunjukkan eksistensi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum bukanlah hal yang mudah. Mulai dari kehadiran UU Pendidikan No. 4 tahun 1950 hingga kehadiran SK Mendiknas No.23/U/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, kemudian Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, telah menempatkan Pendidikan Agama sebagai Mata Kuliah Pengembangan. Ini berarti pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Ada nuansa integrasi antara mata kuliah Pendidikan Agama dengan mata kuliah lainnya. Dinamika ini telah melalui pergolakan berbagai kepentingan, baik kepentingan secara politik, sosial, budaya, ekonomi dan emosi (sentiment) keagamaan turut ikut serta di dalamnya.

Jika proses pengajaran dan pendidikan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum terintegrasi secara kontekstual maka akan menghadirkan cendekiawan muda yang bukan hanya memiliki value, tetapi juga bermental spiritual yang dapat diandalkan untuk pembangunan masyarakat bahkan pembangunan peradaban manusia di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran al-Karim. Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahdli Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1418 H.
- Ajjjola. Alhaji A.D, *Restructure of Islamic Education*, Delhi: Adam publisher & Distributors, 1999.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan; Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006.
- Endy Fadlullah, *Peta Gerakan Islam Radikal*, Surabaya: Jawa Pos, 2008.
- M. Arifin, *Kapita Selecta Pendidikan*, Semarang: Toha Putra, 1981.
- M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, Medan: Media Persada, 2000.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UGM, *Pendidikan Agama Islam*, Jogja: Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2006.
- Tap MPRS XXVII/MPRS/1966 UU No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran.
- UU No. 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi
- UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas
- Yudi Latief, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.
- Zakiah Daradjat, dkk , *Dasar-Dasar Agama Islam. Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.